

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi

2.1.1. Pengertian Kawasan Andalan

Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (1996) mendefinisikan bahwa Kawasan Andalan adalah Kawasan yang berpotensi untuk cepat tumbuh dibandingkan dengan kawasan lainnya yang ada di suatu propinsi. Pertumbuhan yang terjadi diharapkan membawa dampak positif bagi kawasan di sekitarnya (*Hinterland*). Penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan adalah mengingat “pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan” (Kuncoro, 2006:18).

Kawasan yang mempunyai keterkaitan dengan daerah belakang (*Hinterland*). Kawasan Andalan tidak bisa berdiri sendiri, oleh sebab itu harus memiliki keterkaitan, baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang dengan beberapa daerah pendukung. Keterkaitan ke belakang berarti kawasan andalan mendapat supply kebutuhan komponen produksinya. Keterkaitan ke depan berarti kawasan andalan harus mempunyai daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan atau dikumpulkan di kawasan andalan tersebut.

Hubungan konsep kawasan andalan dengan teori pembangunan regional sangat erat. Untuk menetapkan kawasan andalan memerlukan dukungan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, teori pusat pertumbuhan, dan teori spesialisasi. Sebagai kawasan yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh dibandingkan dari daerah lainnya dalam suatu provinsi, berarti kawasan andalan memiliki faktor-faktor kelebihan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi.

Kawasan andalan dalam PP No.28 tahun 2008 tentang RTRWN adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di darat maupun laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut. Kawasan andalan adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antar

daerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah.

Berdasarkan kriterianya, penetapan kawasan andalan semata-mata didasarkan pada aspek ekonomi, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya faktor lain di luar faktor ekonomi. Penerapan di lapangan hanyalah sebagai simbol kepedulian terhadap realitas keterbelakangan yang dialami daerah, khususnya daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia. Berikut adalah kriteria yang dipakai dalam penetapan Kawasan Andalan antara lain adalah Kawasan yang dapat memenuhi persyaratan :

1. Terdapat lebih dari 3 aglomerasi kota didalamnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap PDB $> 2.5\%$
3. Persentase penduduknya lebih dari 3% dari penduduk provinsi
4. Memiliki prasarana dasar jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandara, prasarana listrik, telekomunikasi, air baku.
5. Memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang memadai untuk dikembangkan.
6. Memiliki sektor unggulan nasional yang sudah berkembang.

2.1.2. Pembangunan Ekonomi Wilayah

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah maka pengertian daerah *region* sendiri berbeda-beda tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi oleh Arsyad (1999: 107) , daerah mempunyai 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. Daerah dianggap satu ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang kesamaan, sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografis, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian sifat ini disebut daerah homogen.
2. Daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut modal.
3. Daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu Provinsi, satu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini berdasarkan kepada pembagian administrasi suatu negara. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administrasi.

Pengertian yang ketiga lebih banyak digunakan karena dalam melaksanakan kebijakan diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah, sehingga lebih praktis bila suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi yang ditentukan berdasarkan kesatuan administratif agar lebih mudah dikelola dan diberdayakan. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di Indonesia pada umumnya menggunakan *planning region*.

Arsyad (1999:115) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

2.1.3. Pendekatan Ekonomi Wilayah

Kurang terintegrasinya pembangunan wilayah yang maju dengan daerah kurang maju dapat menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan daerah kurang maju. Sebab wilayah yang lebih maju tidak dapat merangsang komersialisasi pertanian di wilayah kurang maju. Struktur pasar dan distribusi sarana dan prasarana yang terjadi antara wilayah maju dan kurang maju menjadikan wilayah tersebut sulit untuk memasarkan surplus produksi, mendapatkan input produksi, memoderenisasi pola-pola pertanian, penyesuaian produk terhadap kebutuhan konsumen (pasar), dan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas hidup (Rondinelli, 2000).

Pengembangan wilayah harus mampu mendorong wilayah untuk tumbuh secara mandiri berdasarkan potensi-potensi sosial ekonomi serta karakteristik spesifik yang dimilikinya tanpa harus memperlemah kesatuan nasional. Begitu pula interaksi ekonomi antar wilayah harus semakin menguat.

Selanjutnya, Blakely (1989) menegaskan bahwa *local economic development* adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik, pencarian pasar, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada Skala lokal. Jadi pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Bila faktor biaya transport menjadi hal utama dalam aspek ruang ekonomi, maka konsep biaya transport harus dilihat dalam lingkup yang lebih luas, yaitu mencakup mobilitas faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal), mobilitas produksi (barang dan jasa) dan mobilitas konsumen dan produksi tersebut.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Suatu daerah terbagi kedalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah. Misalnya daerah provinsi dalam wilayah tersebut masih terbagi atas berbagai sub wilayah seperti kabupaten atau kota. Pertumbuhan daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama yang antara lain: 1) sumber daya alam yang tersedia, 2) tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam, 3) adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang seperti transportasi, komunikasi, 4) tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam, dan 5) tersedianya kualitas sumber manusia untuk pengelolaan teknologi (Sukirno, 1985).

Sumber daya alam dapat berupa lahan pertanian, bahan tambang atau galian yang dapat mendukung industri pengolahan atau sumber daya alam lainnya yang akan mempunyai arti penting bagi daerah yang memilikinya. Daerah tersebut akan berspesialisasi dalam suatu sub sektor atau sektor dan akan mempunyai keuntungan absolut bagi daerah lainnya. Jika daerah tersebut dikelola secara baik dengan modal dan teknologi yang memadai maka daerah tersebut dapat diharapkan akan mengalami pertumbuhan dengan pesat.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat, jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian (Sukirno 1985: 19). Disebutkan juga bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat perekonomian lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya dengan kata lain perkembangan akan tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Todaro (2004 : 111) menyatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, pertama : akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia, kedua; pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendiri membawa pertumbuhan angkatan kerja, ketiga; kemajuan teknologi.

2.1.5. Teori Spasial

a. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Teori ini dipelopori oleh ahli Prancis, Francois Perroux (dikutip dari Darwent, 1969) yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan atau pembangunan (*development*) tidak terjadi di segala tempat pada ruang (*space*), tetapi hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu, yang mempunyai berbagai variabel dengan intensitas yang berbeda-beda”.

Dasar pemikiran konsep teori ini adalah bahwa kegiatan ekonomi didalam suatu wilayah cenderung beraglomerasi di sejumlah kecil (beberapa titik) titik-titik vokal. Dalam suatu wilayah, arus polarisasi akan cenderung bergravitasi (tertarik) kearah titik-titik vokal tersebut. Di antara titik-titik vokal tersebut (pusat yang dominan) dapat ditentukan garis pembatas, dimana kepadatan arus akan menurun sampai suatu tingkat minimum. Pusat tersebut dinamakan kutub pertumbuhan, sedangkan wilayah didalam garis pembatas merupakan wilayah pengaruhnya atau wilayah pertumbuhannya.

Distribusi penduduk secara spatial tersusun dalam suatu sistem hirarki pusat-pusat dan kaitan-kaitan fungsionalnya. Semakin kuat ciri-ciri wilayah nodal, semakin dominan wilayah pengaruhnya, semakin tinggi tingkat pertumbuhannya,

tingkat pertumbuhan ekonomi dan sosialnya. Dalam hal ini strategi pengembangan wilayahnya adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan mengeliminir hambatan-hambatan yang muncul, atau mengarahkan pembangunan sesuai dengan kondisi alamiah masing-masing wilayah. Strategi ini juga mengkombinasikan sifat-sifat tempat sentral yang mempunyai orde tinggi, dengan lokasi potensial yang memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi.

Kutub pertumbuhan tidak hanya merupakan lokasi industri-industri pendorong, melainkan harus mampu mendorong ekspansi yang cukup besar di wilayah pengaruhnya. Oleh karena itu, yang lebih menonjol adalah pengaruh polarisasi strateginya daripada keuntungan antar industrinya. Faktor-faktor penting untuk mendorong polarisasi di wilayah itu, adalah prasarana, ketersediaan pelayanan-pelayanan (fasilitas) sentra, penyerapan hasil produksi di wilayah pengaruhnya, serta pesebaran kesadaran pertumbuhan dan dinamisme ke seluruh wilayah pengaruh. Teori ini menjelaskan pula adanya interaksi antara kutub-kutub pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya.

b. Teori Inti dan pinggiran (*Center-Periphery Theory*)

Friedman (1964) mengamati bahwa dalam suatu wilayah terdapat perbedaan prinsip antara daerah inti (*center*) dengan daerah pinggiran (*periphery*) di sekitarnya, yang wring pula disebut daerah belakang, hinterland, pedalaman. Wilayah-wilayah pusat merupakan subsistem-subsistem dari sistem yang lebih besar (propinsi, nasional, internasional) yang kemajuan pembangunannya ditentukan oleh lembaga-lembaga di daerah inti tersebut. Hubungan daerah inti dan daerah pinggiran mempunyai karakter yang spesifik karena adanya pengaruh-pengaruh kuat dari daerah pusat terhadap daerah pinggirannya, antara lain pengaruh dominasi, pengaruh informasi, pengaruh psikologi, pengaruh mata rantai, dan pengaruh produksi.

- Pengaruh dominasi muncul karena melemahnya perekonomian daerah-daerah pinggir sebagai akibat mengalirnya potensi sumber (daya alam, SDM, modal) ke daerah inti.
- Pengaruh informasi: terjadi akibat semakin meningkatnya interaksi di daerah inti (yang menunjang peningkatan inovatif), sehingga daerah inti menjadi pusat informasi bagi daerah pinggirannya.

- Pengaruh psikologis: terjadi akibat terciptanya kondisi-kondisi yang semakin menggairahkan di daerah inti yang dilanjutkan secara lebih nyata di pusat maupun didaerah pinggiran.
- Pengaruh mata rantai: ditandai dengan adanya kecenderungan melakukan inovasi-inovasi selanjutnya, dan hasil-hasil inovasi yang sudah ada terdahulu.

Selanjutnya, Friedman dan Alonso (1964) mengembangkan klasifikasi daerah metropolitan (*metropolitan region*), daerah poros pembangunan (*development axes*), daerah perbatasan (*frontier region*), dan daerah tertekan (*depressed region*). Secara essensial hubungan antar daerah metropolitan dan daerah perbatasan tidak berbeda dengan hubungan antara daerah inti dengan daerah pinggiran. Poros pembangunan merupakan perluasan dari daerah metropolitan dan sebagai bentuk embrio untuk berkembang sebagai megapolis. Wilayah perbatasan termasuk dalam kategori daerah pinggiran dan didalamnya terdapat pusat-pusat kecil yang mempunyai potensi berkembang menjadi pusat-pusat yang lebih besar pada masa yang akan datang.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara kepada kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, selain itu IPM digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Davies, 2006).

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the *ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia/penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Sasaran akhir dari pembangunan sendiri adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Secara khusus, indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat

dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembanguna untuk hidup layak.

2.1.7. Sistem Infrastruktur

Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (Sullivan, 2003). Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Untuk menjadi pusat pertumbuhan (*growth center*) harus didukung dengan infrastruktur yang memadai sebagai landasan pijak bagi terjadinya konsentrasi dan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi sekaligus sebagai outlet bagi kegiatan perdagangan antar wilayah guna meningkatkan peluang dan nilai investasi. (Adisasmita, 2012). Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolaan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

Salah satu bagian penting dari kunci sukses KAPET adalah adanya infrastruktur manajemen informasi yang memadai, mengingat KAPET perlu memiliki sumber informasi yang memadai bagi para pelaku bisnis untuk dapat berperan serta melakukan investasi di kawasan tersebut (Handoyo, 2005).

2.1.8. Teori Ekonomi Wilayah

a. Teori Basis Ekonomi

Richardson (2001:18) mengembangkan suatu teori ekonomi regional yaitu basis ekonomi. Dalam teori basis ekonomi atau teori basis-ekspor (*economic base theory*), menyatakan bahwa penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Teori basis ekonomi ini pada intinya membedakan sektor basis dan aktifitas sektor non basis.

Aktifitas sektor basis yang mampu secara luas menjual produknya baik di dalam maupun di luar daerah akan mempengaruhi pertumbuhan sektor tersebut dan menentukan pembangunan menyeluruh bagi daerah tersebut termasuk peningkatan kesempatan kerja yang berpengaruh pada pendapatan regional. Aktifitas sektor non basis merupakan sektor sekunder yang artinya tergantung pada perkembangan yang terjadi pada sektor basis yang akan menyebabkan terjadinya perubahan pada konsumsi dan investasi di daerah. Dengan kata lain kedua sektor tersebut mempunyai hubungan dengan permintaan dari luar wilayah. Sektor basis berhubungan secara langsung sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung. Apabila permintaan dari luar meningkat maka sektor basis akan meningkat dan juga akan mengembangkan sektor non basis. Setiap pertumbuhan sektor basis dan non basis memiliki efek ganda terhadap perekonomian wilayah.

Cara yang paling mudah untuk menaksir besarnya basis adalah dengan jalan menghitung untuk setiap sektor yang mempunyai $LQ > 1$. Indeks pekerja surplus (yakni selisih antara tenaga kerja pada industri nasional yang merupakan bagian pranata bagi daerah yang bersangkutan). Teknik LQ lebih lazim digunakan dalam studi-studi basis empiris LQ. Asumsinya adalah bahwa jika suatu daerah lebih berspesialisasi daripada daerah yang bersangkutan dalam memproduksi suatu barang tertentu, maka daerah tersebut dapat mengekspor barang itu sesuai dengan tingkat spesialisasinya dalam memproduksi barang tersebut.

b. Keunggulan Komperatif dan Keunggulan Kompetitif Wilayah

Dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah terdapat dua faktor utama. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau yang mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor

ekonomi di masa yang akan datang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang, walaupun di saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komperatif (*comperative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Istilah keunggulan komperatif (*comperative advantage*) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1917 (Tarigan, 2005). Ricardo membuktikan bahwa ada dua wilayah saling berdagang, masing-masing menspesialisasikan diri untuk mengeksport barang yang memiliki keunggulan komperatif, maka kedua wilayah tersebut akan beruntung. Keunggulan komperatif lebih menekankan kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan suatu daerah, seperti kepemilikan sumberdaya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain.

Berkaitan dengan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif, maka berdasarkan kegiatan ekonomi wilayahnya dapat saja memiliki kedua jenis keunggulan tersebut secara bersama-sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh satu atau gabungan beberapa faktor berikut ini (Tarigan, 2005):

1. Memiliki potensi sumber daya alam;
2. Penguasaan masyarakat terhadap teknologi mutakhir dan ketrampilan-ketrampilan;
3. Aksesibilitas wilayah yang baik;
4. Memiliki pasar yang baik atau dekat dengan pasar;
5. Wilayah yang memiliki sentra-sentra produksi tertentu atau terdapatnya aglomerasi dari kegiatan ekonomi;
6. Ketersediaan buruh yang cukup dan memiliki ketrampilan baik dengan upah yang relatif rendah;
7. Mentalitas masyarakat yang baik untuk pembangunan: jujur, mau terbuka, bekerja keras, dapat diajak kerjasama dan disiplin; dan
8. Kebijakan pemerintah yang mendukung pada terciptanya keunggulan-keunggulan suatu kegiatan ekonomi.

c. Shift Share

Menurut Arsyad (1999: 314) analisis “*shift share*” merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Teknik analisis ini biasanya menggunakan data yang umumnya dimiliki suatu wilayah, misalnya output, pendapatan perkapita atau tenaga kerja.

Pertumbuhan daerah pada umumnya dipengaruhi oleh *National Share*, *Propotional Shift*, dan *Differential Shift.Share*. Komponen *National Growth Effect* yaitu pertumbuhan daerah yang dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Jika pertumbuhan daerah sama dengan pertumbuhan rata-rata nasional maka peranannya terhadap nasional akan tetap. *Propotional Shift/Industrial Mix Growth*, yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah dengan penggunaan pertumbuhan nasional sektor dan pertumbuhan daerah dengan penggunaan pertumbuhan nasional total. Daerah dapat tumbuh lebih cepat atau lambat dari nasional. Dengan demikian perbedaan laju pertumbuhan daerah dan nasional disebabkan oleh komposisi sektor yang berbeda (*Component Mix*). *Differential Shift.Share/Regional Share/Competitive Effect*, yaitu perbedaan pertumbuhan daerah secara aktual dengan pertumbuhan daerah.

Jika menggunakan pertumbuhan sektoral untuk nasional. Daerah dapat saja mempunyai keunggulan komperatif dibandingkan dengan daerah lain karena lingkungannya mendorong suatu sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan di sini dapat berarti lahan, tenaga kerja, maupun keahlian tertentu.

Menurut Soepono (1993) mengemukakan bahwa analisis Shift–Share mempunyai empat kegunaan yaitu (1) untuk mengetahui sejauh mana peranan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan; (2) untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap suatu sektor perekonomian; (3) untuk mengetahui komponen yang mempengaruhi nilai tambah atau PDRB di daerah studi; (4) untuk mengetahui pergeseran ekonomi wilayah studi sebagai akibat perubahan ekonomi wilayah yang lebih luas (referensi).

2.2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Sebagai upaya pengembangan Kawasan Indonesia Timur dalam rangka mengejar ketertinggalannya terhadap Kawasan Indonesia Barat, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap Kawasan Indonesia Timur yang secara formal-politis dimulai saat frase "pembangunan Kawasan Indonesia Timur" dicantumkan pada GBHN Tahun 1993. Kemudian hal ini segera diikuti dengan pembentukan Dewan Pengembangan KTI. Pada Tahun 1996, KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) diperkenalkan menjadi model perencanaan pembangunan di Kawasan Indonesia Timur oleh dewan tersebut.

Model ini mengadopsi konsep *growth centers (growth pole)*, yaitu menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, berupa satu kawasan andalan prioritas mewakili masing-masing propinsi. Kawasan ini didukung oleh kegiatan sektor/komoditi unggulan, yang berupa potensi sumber daya lokal, yang diharapkan menjadi *prime mover* pengembangan propinsi yang bersangkutan (Prasetya dan Hadi, 2000).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), telah menetapkan KAPET sebagai kawasan strategis bidang ekonomi. Dengan dukungan legalitas ini, KAPET yang dibangun di berbagai wilayah potensial di Indonesia diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan membentuk keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem ekonomi wilayah. Oleh karena itu, pengembangan KAPET diarahkan untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi.

2.2.1 Deskripsi KAPET

Berdasarkan Keppres 89/1996, yang dimaksud dengan KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan, Memiliki potensi untuk cepat tumbuh, Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

Pendekatan KAPET sebagai *prime mover* percepatan pembangunan di wilayah khususnya KTI, disusun dan dirumuskan dengan pertimbangan (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2011):

- bertumpu pada prakarsa daerah dan masyarakatnya,
- berdasarkan sumberdaya yang dimiliki kawasan,
- memiliki posisi ke akses pasar regional maupun internasional,
- memiliki sektor-sektor unggulan,
- memberi pengaruh pada pertumbuhan wilayah sekitarnya.

Filosofi pendekatan KAPET secara sederhana dapat digambarkan sebagai upaya untuk menghimpun dan mensinergikan berbagai kemampuan yang ada di berbagai tingkat, sebagai sebuah terobosan dalam mempercepat pengembangan wilayah (KTI) dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada usaha untuk mengambil peran sebagai pilar ekonomi nasional, setelah disadari bahwa cara-cara konvensional terlalu lama diharapkan hasilnya. Karena sifatnya lintas sektor dan lintas wilayah, dibentuk sebuah institusi untuk mengelola, disediakan anggaran operasional (APBN dan APBD), disediakan berbagai insentif, baik fiskal maupun non fiskal, komitmen dukungan sektor untuk menyusun kegiatan diharapkan kawasan KAPET memiliki daya saing yang relatif tinggi untuk menarik investasi dunia usaha (Akil, 2005). Pemerintah berharap dengan sentuhan insentif, fasilitas fiskal dan keringan perpajakan, maka kawasan ini diharapkan akan memiliki daya tarik bagi investor sehingga akan cepat tumbuh dan akan menjadi lokomotif penggerak pembangunan diwilayahnya dan sekitarnya.

Pengembangan Investasi di KAPET berdasarkan kepada komoditas unggulan yang ada di kawasan tersebut, dari hulu sampai dengan ke hilir. Dengan demikian, calon investor dapat mengembangkan usaha mulai dari penyerapan sistem produksi, pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi bahan konsumsi, atau usaha-usaha baru dan jasa lain yang mendukung pendayagunaan komoditi unggulan tersebut.

Tujuan dari pembentukan KAPET adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di Kawasan Utara Indonesia maupun Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang relatif tertinggal dan

beberapa lainnya di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Inti dari pendekatan KAPET adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan-kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan.

2.2.2 Dasar Hukum dan Legalitas KAPET

Penetapan KAPET sebagai Kawasan Strategis Nasional merupakan dukungan legalitas terkait keberadaan KAPET. Perundang-undangan yang menetapkan KAPET sebagai kawasan strategis nasional :

1. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, KAPET sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
2. PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, 13 KAPET ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pasal 77 Bab V PP Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa KAPET sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, memiliki potensi ekspor, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan pertahanan energi nasional atau ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Penetapan KAPET dilakukan pemerintah melalui Keppres No. 89/1996 yang disempurnakan dengan Keppres No. 9/1998, dan selanjutnya disempurnakan kembali dengan Keppres No. 150/2000 yang menetapkan Ketua Badan Pengelola KAPET (BP KAPET) adalah Gubernur. Adapun Penetapan KAPET dijelaskan dalam Keputusan Presiden No.150 Tahun 2000, Pasal 1 yang berbunyi :

1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET, merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan :

- memiliki potensi untuk cepat tumbuh (sumber alam, kelengkapan prasarana dan sarana yang lebih baik dari sekitarnya, memiliki keunggulan lokasi untuk mencapai akses ke pasar regional dan pasar internasional) dan atau;
- mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau
- memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya
- Penetapan KAPET berikut batas-batasnya dilakukan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

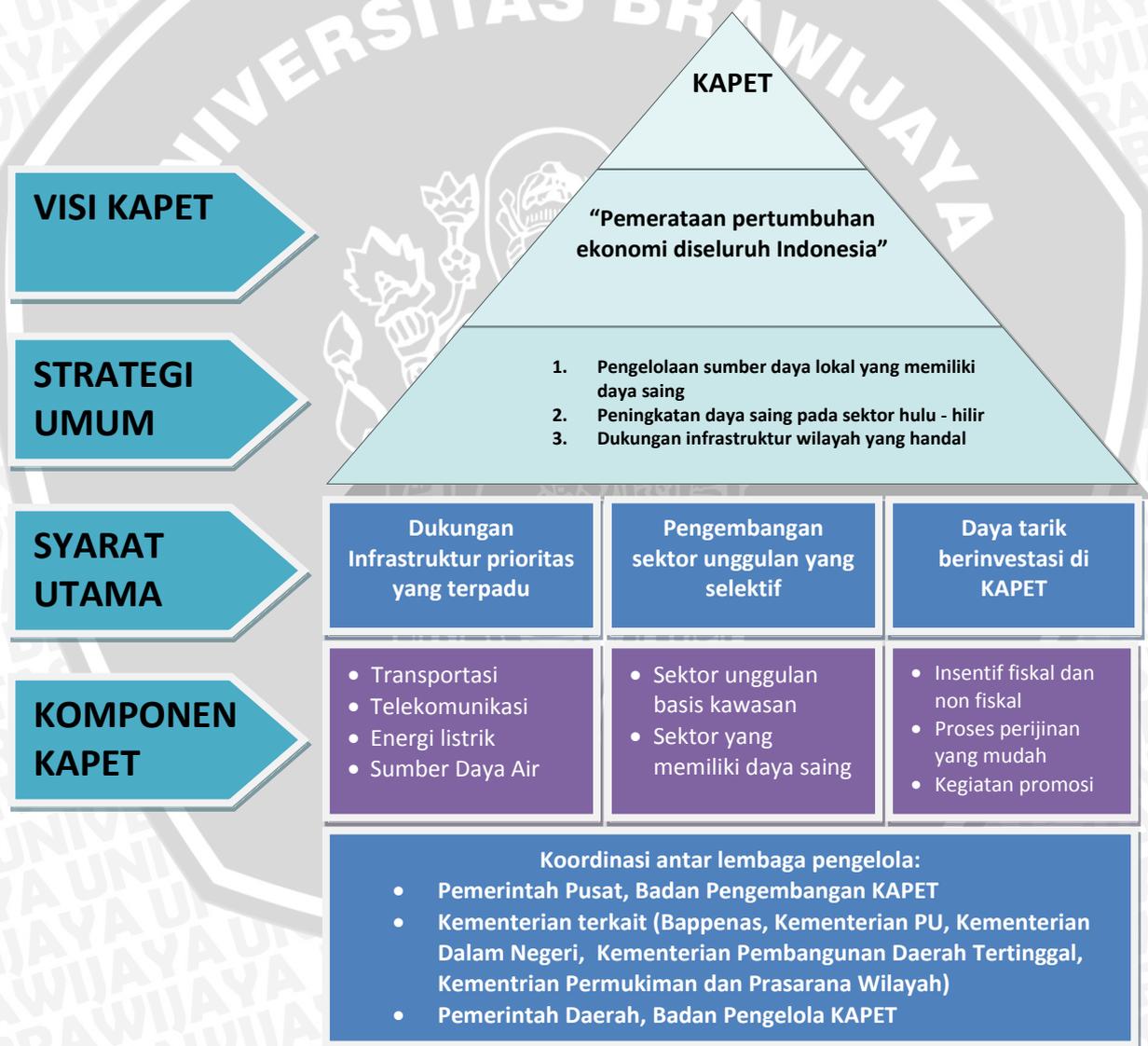
Berdasarkan Keputusan Presiden ini, kemudian lahir Keputusan Presiden lainnya tentang penetapan lokasi KAPET, yaitu 13 KAPET, 12 KAPET di KTI dan 1 KAPET di KBI (1 KAPET 1 Provinsi).

1. Keppres 90/1996 tentang Pembentukan KAPET Biak.
2. Keppres 11/1998 tentang Pembentukan KAPET Batulicin.
3. Keppres 12/1998 tentang Pembentukan KAPET Sasamba.
4. Keppres 13/1998 tentang Pembentukan KAPET Sanggau.
5. Keppres 14/1998 tentang Pembentukan KAPET Manado Bitung.
6. Keppres 15/1998 tentang Pembentukan KAPET Mbay.
7. Keppres 164/1998 tentang Pembentukan KAPET Parepare.
8. Keppres 165/1998 tentang Pembentukan KAPET Seram.
9. Keppres 166/1998 tentang Pembentukan KAPET Bima.
10. Keppres 167/1998 tentang Pembentukan KAPET Batui.
11. Keppres 168/1998 tentang Pembentukan KAPET Bukari.
12. Keppres 170/1998 tentang Pembentukan KAPET DAS Kakab.
13. Keppres 171/1998 tentang Pembentukan KAPET Sabang.

Pengelolaan KAPET sebagai *integrated social overhead capital* dengan *lead time* yang panjang (sekitar 30 tahun) untuk mencapai *break even point*, ternyata tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda (Berkembang dan Belum Berkembang) yang menurut pengamatan sangat dipengaruhi oleh potensi sektor unggulan kawasan, kelayakan lokasi, realisasi dukungan insentif baik fiskal maupun non fiskal serta kemampuan sumber daya manusia Badan Pengelola KAPET dalam menjaring dan memberikan respon terhadap minat investasi (Akil, 2005).

2.2.3 Sistem Pengembangan KAPET

Untuk mewujudkan sebuah perencanaan kawasan ekonomi yang terpadu dan saling terintegrasi sektor satu dan lainnya maka diperlukan sebuah sistem yang mengatur perwujudan tersebut. Dalam hal ini, Pengembangan KAPET diarahkan pada konsep pengembangan klaster ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*), dengan bertumpu pada komoditas unggulan lokal secara selektif. Lebih jelasnya berikut adalah kerangka desain sistem pengembangan KAPET yang dikutip dari RTR KAPET SASAMBA :



Gambar 2.1 Kerangka Desain Sistem Pengembangan KAPET

Sumber : RTR KAPET SASAMBA

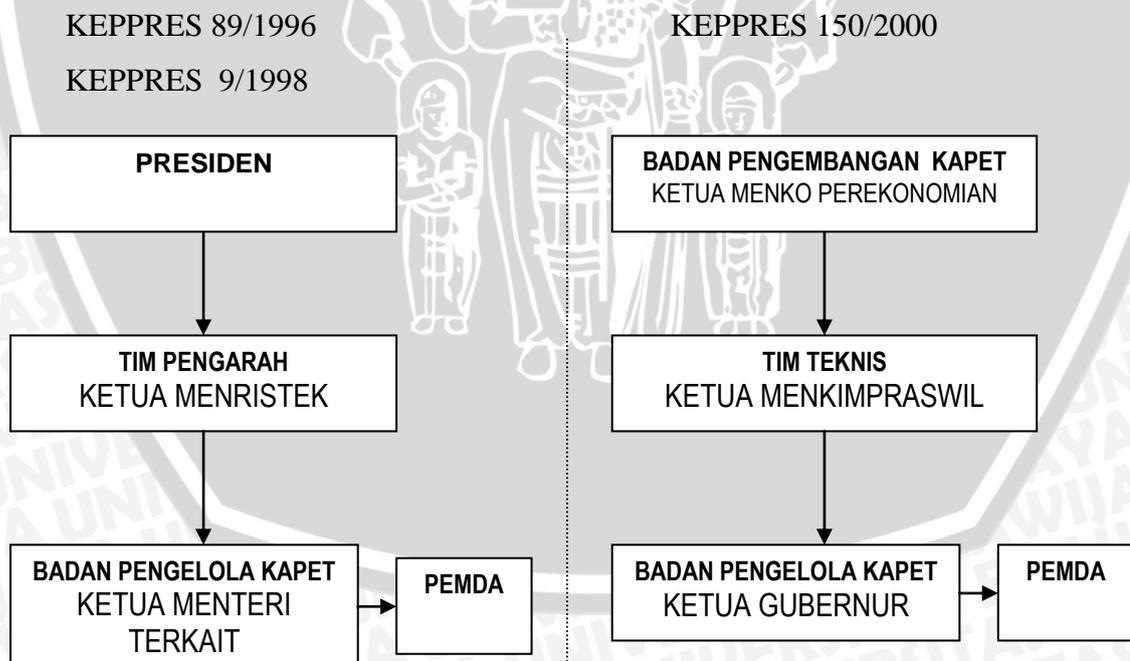
2.2.4 Pembinaan dan Penanganan KAPET

Badan Pengembangan KAPET sesuai Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 150/2000 mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memberikan usulan kepada Presiden untuk kawasan yang akan ditetapkan sebagai KAPET setelah memperhatikan usulan dari Gubernur yang bersangkutan,
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk mempercepat pembangunan KAPET,
- Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di KAPET,
- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan KAPET,
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di KAPET.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pengembangan KAPET mengadakan pertemuan (Rapat Pleno) secara berkala sekala dalam empat bulan.

2.2.4.1 Organisasi Penanganan KAPET



Gambar 2.2 Bagan Organisasi KAPET

Sumber: KEPPRES 272/M/98 & 52/M/97 Pengangkatan Ketua/Wk ketua BP-KAPET

Dalam pelaksanaannya, Badan Pengembangan KAPET dibantu oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Menteri Kimpraswil untuk melakukan dukungan nyata. Untuk memperkuat peran KAPET dilakukan pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam bentuk penyediaan biaya operasionalisasi Badan Pengelola KAPET, yang pada saatnya nanti diharapkan dapat mencapai kemandirian dan siap menjadi suatu badan usaha (*Corporate Unit*).

Semula penanganan KAPET bersifat sentralistis, sesuai paradigma yang berkembang dan munculnya semangat otonomi daerah, maka penanganan KAPET saat ini telah lebih bersifat desentralistis, dengan menetapkan Gubernur selaku Ketua Badan Pengelola KAPET. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Ketua BP KAPET dibantu oleh Wakil Ketua/Kepala Pelaksana Harian sebagai pelaksana tugas sehari-hari yang bertugas mengelola KAPET secara Professional. Wakil Ketua/Kepala Pelaksana Harian, beserta para Direktur BP Kapet diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku Ketua BP KAPET, namun persyaratan kualifikasi personil ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis BP KAPET dengan menitikberatkan pada kemampuan profesionalitas serta kemampuan berkomunikasi dengan dunia usaha.

2.2.4.2 Anggota Badan Pengembangan KAPET

Susunan Keanggotaan Badan Pengembangan KAPET, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 150/2000, terdiri dari:

Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua	: Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Sekretaris	: Kepala BAPPENAS
Anggota	- Menteri Keuangan
	- Menteri Pertanian
	- Menteri Kehutanan
	- Menteri Industri dan Perdagangan
	- Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
	- Menteri Kelautan dan Perikanan
	- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
	- Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
	- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
	- Menteri Muda Percepatan Pembangunan KTI
	- Kepala Badan Pertanahan Nasional

2.2.4.3 Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET

Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET merupakan suatu Tim yang dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas-tugas dari Badan Pengembangan KAPET dalam masalah Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pembangunan di KAPET, sesuai Pasal 4 ayat (1) KEPPRES No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Tugas-tugas dari Tim Teknis adalah membantu Badan Pengembangan dalam hal:

- Memberikan masukan untuk pengusulan kawasan yang akan ditetapkan sebagai KAPET.
- Menyiapkan rumusan kebijakan dan strategi nasional untuk mempercepat pembangunan KAPET.
- Menyiapkan rumusan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di KAPET.
- Melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kegiatan Pembangunan KAPET.
- Menyiapkan fasilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan KAPET.

Susunan Anggota Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET:

Ketua	: Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Sekretaris	: Dirjen. Penataan Ruang, Dep. Kimpraswil
Anggota	- Kantor Menko Perekonomian
	- BAPPENAS
	- Departemen Keuangan
	- Departemen Pertanian
	- Departemen Kehutanan
	- Departemen Perindustrian dan Perdagangan
	- Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi
	- Departemen Kelautan dan Perikanan
	- Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral
	- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
	- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
	- Kantor Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan KTI
	- Kepala Badan Pertanahan Nasional

2.2.4.4 Peran Lembaga-Lembaga Yang Berkaitan dengan Pengembangan KAPET.

- a. Badan Pengembangan KAPET fokus pada fasilitasi pengembangan kawasan yang sebagian besar berada di KTI.
- b. Dewan Pengembangan KTI dan Kantor Menmud PPKTI fokus pada koordinasi kebijakan umum untuk percepatan pembangunan KTI.
- c. Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional dalam Forum IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA dan AIDA fokus pada pengembangan pemasaran dan investasi dalam rangka kerjasama regional dengan negara-negara tetangga.
- d. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), fokus pada koordinasi keterpaduan penataan ruang yang menjadi acuan pengembangan kawasan.
- e. Instansi-Instansi Teknis di Pusat untuk koordinasi lintas sektoral dalam rangka menginventarisir dukungan sektor terkait guna percepatan pembangunan KAPET.

2.2.4.5 Peran Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET

- a. Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET dibentuk dengan SK Menko Perekonomian No. KEP.19/MEKON/04/2001, untuk mendukung secara aktif pengembangan KAPET dengan memberikan masukan kepada Badan Pengembangan KAPET sebagai Policy Maker.
- b. Tugas Tim Teknis adalah untuk membahas secara rutin antara lain:
 - Dukungan sektor bagi percepatan pengembangan KAPET
 - Pembahasan usulan daerah menyangkut perluasan cakupan wilayah KAPET maupun penambahan lokasi KAPET baru, termasuk penyiapan landasan hukum untuk masing-masing KAPET.
 - Kajian kebutuhan insentif fiskal dan non fiskal bagi KAPET.
 - Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan KAPET dll.

2.2.5 Peran dan Perkembangan KAPET

Pada awalnya tiap-tiap KAPET memiliki kewenangan, khususnya dibidang koordinasi dan percepatan perijinan dengan “*zero cost*”, membantu para pengusaha untuk memperoleh insentif perpajakan dan sebagainya. Namun baru beberapa tahun umur KAPET, telah terjadi beberapa kali pergantian pemimpin Negara yang berdampak pada perubahan aturan dan kebijakan. Dengan berubahnya era ORDE BARU menjadi era REFORMASI dan sekarang telah memasuki era OTONOMI. Peran KAPET semakin sulit karena masing-masing daerah memasuki daerah kota dan kabupaten telah memiliki kewenangan dan ingin mengatur daerahnya sendiri-sendiri, sehingga peran KAPET saat ini hanya menjadi FASILITATOR (Mulyadi, 2009).

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pada akhirnya kebijakan KAPET disempurnakan kembali melalui Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000. Sejak tahun 1998 sampai saat ini ada usulan untuk memperluas cakupan wilayah KAPET dan usulan KAPET baru, menurut Sekretariat Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET, hal ini dikarenakan kawasan-kawasan lain mempunyai sektor unggulan dan memiliki peluang pasar yang lebih baik (Heripoerwanto, 2004) meliputi:

- Permintaan KAPET baru (Kawasan Gopandang Gorontalo, Kawasan Goal Jailolo Maluku Utara),
- Permintaan KAPET Baru di provinsi yang sudah memiliki KAPET (Kawasan Nunukan-Tatapanbuma di Kalimantan Timur, Kawasan Selayar Sulawesi Selatan, Kawasan Timor Barat Nusa Tenggara Timur, Kawasan Sorong Papua),
- Permintaan perluasan wilayah KAPET yang sudah ada (Kapet Khatulistiwa, Batui, Bukari, Bima dan Mbay) serta,
- Relokasi wilayah KAPET (Kapet Sabang menjadi Bandar Aceh Darussalam).

Usulan permintaan KAPET baru tersebut hingga saat ini belum disetujui, respon terhadap permintaan tersebut juga tidak dilakukan secara parsial, namun dilakukan dengan pendekatan lebih yang komprehensif yaitu mempertimbangkan permintaan tersebut dengan komitmen mengembangkan Kawasan Andalan, yang

bersifat nasional. Lokasi KAPET diusulkan oleh daerah yang dipilih dari kawasan andalan yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Sepanjang pembentukannya sampai saat ini, banyak sekali pro dan kontra tentang KAPET, baik itu pejabat pemerintah, pengusaha (*stake holder*) dan lain-lain. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini, di tingkat pusat telah beberapa kali melakukan evaluasi terhadap 13 KAPET di Indonesia dan dari hasil itu ada 5 (lima) KAPET yang dinilai berhasil dan 2 (dua) diantaranya yang berkembang dan dapat memberikan investasi yang besar yaitu KAPET Manado-Bitung dan KAPET SASAMBA (Heripoerwanto, 2004).

Banyak yang belum memahami peran KAPET yang sekarang sebagai FASILITATOR sehingga banyak yang menuntut agar KAPET mampu membangun Kawasan Industri yang memiliki daya tarik bagi investor. Ada pula yang berpendapat bahwa KAPET harus mampu menarik investor sementara kebijakan pemerintah, birokrasi, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), jaminan keamanan, kepastian hukum, pengaturan tenaga kerja semuanya masih menghantui para investor (Mulyadi, 2009). Sementara menurut beberapa pengelola KAPET di daerah, mereka telah berusaha dan berupaya untuk berbuat dalam rangka memajukan perekonomian di wilayah KAPET khususnya, mereka juga telah turut mempromosikan berbagai hal pada berbagai kesempatan promosi didalam maupun diluar negeri.

Sejak tahun 2004, peran KAPET sebagai FASILITATOR ini memang dinilai oleh beberapa pihak kurang memberikan hasil yang optimal. KAPET belum bisa memenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Beberapa faktor yang menjadi penyebab "kegagalan" KAPET adalah sebagai berikut (Susilowati, 2004):

- a. SDA yang ada "masih terpendam" dan belum kompetitif, artinya belum dibandingkan dengan SDA yang sama di lokasi lain yang lebih potensial. Dengan demikian, dengan cara apapun akan masih sulit untuk menarik investor.
- b. Masih belum terfokusnya prioritas sektor unggulan di beberapa KAPET, akibat kurang tajamnya kajian dalam pemilihan lokasi KAPET, sehingga kawasan yang kurang potensial tersebut belum mampu dikembangkan dengan dana yang terbatas.

- c. Masih lemahnya koordinasi dan dukungan dari instansi teknis di daerah dalam pengembangan KAPET, sehingga ketergantungannya kepada pemerintah Pusat masih sangat besar.
- d. Masih rendahnya kualitas SDM KAPET yang berbasiskan profesionalisme dalam bidang finance, business legal, pengembangan kelembagaan, kompetisi pada tingkat internasional.
- e. Kelembagaan pengelola dan pelaksana : kurangnya komitmen dan konsistensi implementasi kebijakan KAPET, kurang efektifnya Keppres 150/2000, BP KAPET tidak memiliki kewenangan eksekuting, kurangnya dukungan kementerian dan SKPD terkait.
- f. Iklim investasi belum kondusif : proses perijinan usaha yang berbelit-belit, lambat, mahal, banyaknya Perda yang menghambat pengembangan dunia usaha seperti pungutan liar, pungutan berganda, dan sebagainya. Kondisi tersebut mengakibatkan lambatnya perkembangan dunia usaha dalam mendorong pengembangan industri sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.
- g. Terbatasnya aksesibilitas pendukung kelancaran pengembangan usaha seperti kurangnya infrastruktur, tidak berkembangnya jaringan pasar, kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha, kurangnya transfer teknologi bagi pelaku usaha sehingga produk kurang berkualitas dan kurang efisien, data dan informasi yang diperlukan tidak akurat dan tidak lengkap.

Berdasarkan hasil rapat Badan Pengembangan KAPET dengan Komisi V DPR-RI tahun 2008 dan Komisi VI DPR-RI tahun 2011, memberikan apresiasi serta sepakat melanjutkan program pengembangan KAPET dengan syarat harus merevitalisasi dan mereformulasi sistem KAPET melalui penguatan institusi dan memperbaiki insentif fiskal bagi investor. Salah satu upaya yang dilakukan untuk revitalisasi KAPET ini adalah dengan melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang KAPET (RTR KAPET) sebagai acuan dalam pengembangan wilayah. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTR KAPET sebagai kawasan strategis nasional harus diprioritaskan. Sampai saat ini proses penyusunan 13 Raperpres RTR KAPET dan Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) pengganti Keppres no.150 tahun 2000 baru sampai pada level pembahasan.

2.3 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Perbedaan
1.	Dewiyanti (2006)	Penetapan Kawasan Andalan Sebagai Pusat Pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan (Universitas Diponegoro)	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui pola dan struktur dan kawasan andalan yang menjadi pusat pertumbuhan di Propinsi Sulawesi Selatan dengan periode 1999-2003 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis LQ, Klassen Typology 	Terdapat perbedaan pada karakteristik wilayah serta pada penelitian ini menggunakan analisis Klaasen Typology untuk klasifikasi daerah
2.	Imam Indratno (2010)	Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Indonesia – Malaysia (Kalimantan – Sarawak – Sabah) (Universitas Islam Bandung)	<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pembangunan kawasan melalui upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi Membuka keterisolasian wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai sosial budaya setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu pada tiga pendekatan yang digunakan yaitu : pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan, dan pendekatan lingkungan. 	Terdapat perbedaan pada karakteristik wilayah serta pada penelitian ini lebih kepada pengembangan kawasan perbatasan dari seluruh aspek
3.	Erni Kurniasih (2009)	Panca Evaluasi Ketetapan KAPET Sanggau/Khatulistiwa di Kalimantan Barat (Universitas Tanjung Pura)	<ul style="list-style-type: none"> Melihat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita kabupaten/kota subsektor ekonomi unggulan yang potensial, Mengevaluasi ketetapan penetapan KAPET Khatulistiwa sebagai kawasan andalan di Kalimantan Barat, dilihat dari kriteria persyaratannya sub-sub pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis LQ, Klassen Typology 	Perbedaan pada tingkatan ruang lingkupnya, yaitu antara kawasan perbatasan antar negara dengan KAPET Khatulistiwa. Materi studi yang dibahas juga lebih ditekankan pada aspek ekonomi dan ketentuan penetapan KAPET Khatulistiwa
4.	Enirawan (2007)	Pengembangan KAPET Bima, NTB (Institut Pertanian Bogor)	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam pengembangan wilayah Kapet Bima, Keterkaitan antar sektor Mengetahui sektor unggulan wilayah Kapet Bima. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Deskriptif Potensi Pengembangan Wilayah, Analisis Input-Output (IO), Analisis LQ 	Terdapat perbedaan pada karakteristik wilayah serta pada penelitian ini lebih kepada pengembangan KAPET Bima

2.4 Kerangka Teori

